



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUKAROMAH SYAKOER
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 225958

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.677.594.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 283 m2/40 m2 di PEKALONGAN, WARISAN Rp. 586.839.000
2. Tanah Seluas 1045 m2 di PEKALONGAN, WARISAN Rp. 297.825.000
3. Tanah Seluas 460 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 12.420.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 39.900.000
5. Tanah Seluas 93 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 2430 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 65.610.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 350.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, CHRYSLER SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 411.490.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 548.748.367**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 388.470.000

Sub Total

Rp. 3.376.302.367

III. HUTANG

Rp. 131.268.125

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.245.034.242

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.